

Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Lokal: Kolaborasi Akademik dan DPRD

Raihan A. Hanasi^{1*}, Febriany Hasnawati Napu², Siti Nurhaliza Labasir³, Mohamad Rifky Abdullah⁴

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespodensi: raihan@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 25-10-2025

Disetujui 05-11-2025

Diterbitkan 07-11-2025

Katakunci:

*Partisipasi;
Masyarakat;
Keputusan Lokal;*

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Meskipun desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih rendah, dengan hanya 40% penduduk yang terlibat. Program ini mencakup penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat serta perangkat desa dalam berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, juga akan dibentuk forum musyawarah desa yang inklusif, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan DPRD untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman suara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal pelayanan publik, program ini akan fokus pada perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan akses pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan penyediaan air bersih. Program ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan dasar yang lebih baik.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Raihan A. Hanasi, Febriany Hasnawati Napu, Siti Nurhaliza Labasir, & Mohamad Rifky Abdullah. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Lokal: Kolaborasi Akademik dan DPRD. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(6), 1847-1856. <https://doi.org/10.63822/kw38tz59>

PENDAHULUAN

Desa Mootinelo, terletak di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Namun, meskipun memiliki sumber daya tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal masih terbatas. Pada kondisi saat ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa cenderung kurang optimal, khususnya dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini berimplikasi pada ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dan kurangnya kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mitra sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah Desa Mootinelo, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan lokal. Profil masyarakat Desa Mootinelo menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan perikanan, dengan sebagian kecil beralih ke sektor informal. Meski demikian, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa masih terbilang rendah, dengan pengambilan keputusan yang lebih dominan dilakukan oleh sebagian kecil elemen desa, seperti perangkat desa dan kepala desa. Berdasarkan data yang tersedia, sekitar 60% dari total penduduk desa belum terlibat dalam forum musyawarah desa yang menyangkut perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran desa.

Kondisi eksisting ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan lokal. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama dalam menyampaikan aspirasi atau mendapatkan informasi terkait pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat ini, seperti kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pengambilan keputusan desa, rendahnya pendidikan politik, serta terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat secara terbuka.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Mootinelo dalam pengambilan keputusan lokal yang akan berdampak langsung pada pembangunan desa. Kegiatan ini akan dilakukan dengan kolaborasi akademik antara dosen dan mahasiswa dengan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan desa. Salah satu hasil yang diharapkan adalah terbentuknya forum musyawarah desa yang lebih representatif dan terbuka, yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda.

Kegiatan ini juga sejalan dengan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kapasitas pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif, sesuai dengan tujuan SDGs nomor 16 yang menekankan pada pentingnya institusi yang kuat, adil, dan transparan. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung analisis situasi ini, kegiatan pengabdian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data sosial-ekonomi yang relevan mengenai masyarakat Desa Mootinelo. Data ini meliputi

profil demografi, kondisi perekonomian, dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial di desa. Selain itu, penting juga untuk menggali lebih dalam mengenai pola keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk partisipasi dalam program pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa. Pembahasan ini akan mencakup pengidentifikasian kelompok masyarakat yang kurang terwakili dalam pengambilan keputusan, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya.

Selain itu, kegiatan ini juga akan mengevaluasi keberadaan dan efektivitas struktur kelembagaan di tingkat desa, termasuk perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan lokal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan, melalui pendekatan kolaboratif antara akademisi dan DPRD, solusi yang ditawarkan dapat mendukung terciptanya sistem pemerintahan desa yang lebih transparan, adil, dan partisipatif, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Mootinelo.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Mootinelo dalam pengambilan keputusan lokal yang berpengaruh pada pembangunan desa.
2. Membangun forum musyawarah desa yang lebih representatif dan inklusif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan memperbaiki fasilitas kesehatan, meningkatkan akses pendidikan, serta memperbaiki infrastruktur dasar, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih.

METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Mootinelo dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, perangkat desa, akademisi, dan anggota DPRD. Metode pelaksanaan yang digunakan terdiri dari dua area utama yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Lokal

Langkah pertama dalam pelaksanaan program adalah sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam musyawarah desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pengambilan keputusan dan bagaimana peran serta masyarakat dapat berkontribusi dalam proses tersebut.

Langkah kedua adalah pelatihan bagi perangkat desa terkait teknik fasilitasi musyawarah desa yang inklusif. Pelatihan ini ditujukan agar perangkat desa memiliki keterampilan dalam memfasilitasi musyawarah desa yang dapat mengakomodasi aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok

rentan seperti perempuan dan pemuda.

Langkah ketiga adalah implementasi forum musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Forum ini akan dipandu oleh tim pelaksana yang akan memastikan bahwa proses musyawarah desa berjalan secara inklusif dan dapat menghasilkan keputusan yang lebih representatif. Forum musyawarah desa ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan ide-ide mereka secara terbuka, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan partisipatif.

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur

Langkah pertama untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melakukan penilaian terhadap kondisi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang ada di Desa Mootinelo. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada serta mengukur sejauh mana fasilitas yang ada memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah kedua adalah penguatan dan perbaikan fasilitas yang telah dinilai. Fasilitas puskesmas akan diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sedangkan sarana pendidikan akan ditingkatkan agar dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan desa dan penyediaan air bersih, akan menjadi prioritas untuk mendukung kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Langkah ketiga adalah program penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan pelatihan keterampilan untuk pemuda desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, sementara pelatihan keterampilan akan memberikan pemuda desa keahlian yang dapat mendukung mereka dalam menciptakan peluang ekonomi.

Program ini akan dilanjutkan dengan mekanisme pemantauan yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Pemantauan ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertahankan dan diimplementasikan secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta perbaikan infrastruktur. Hasil evaluasi akan menjadi bahan untuk perbaikan lebih lanjut dalam implementasi program.

Pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat akan dilanjutkan dengan pemberian pelatihan lanjutan, terutama dalam hal teknik fasilitasi musyawarah desa, manajemen sumber daya desa, serta keterampilan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan pemuda. Pelatihan lanjutan ini akan memastikan bahwa keterampilan yang telah diajarkan dapat diterapkan secara terus-menerus, baik dalam musyawarah desa maupun dalam pengelolaan program-program pembangunan di masa depan.

Keberlanjutan program ini juga bergantung pada penguatan struktur kelembagaan di tingkat desa. Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan diberikan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat terus melaksanakan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mengelola anggaran dan sumber daya desa secara efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka

panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Mootinelo, terutama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Keberlanjutan program juga akan dijaga melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara masyarakat, perangkat desa, akademisi, dan pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada peningkatan efektivitas dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan lokal di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. Sebelum program ini dilaksanakan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut masih sangat rendah, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam partisipasi yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang melibatkan sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan forum musyawarah desa yang lebih inklusif dan terbuka sangat diperlukan. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai implementasi program pengabdian ini.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Lokal

Salah satu tujuan utama dari program pengabdian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa. Sebelum pelaksanaan program ini, sebagian besar masyarakat Desa Mootinelo tidak terlibat secara aktif dalam musyawarah desa yang membahas perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengambilan keputusan dan keterbatasan akses bagi mereka untuk menyampaikan pendapat dalam forum tersebut. Program ini bertujuan untuk mengatasi tantangan ini melalui pendekatan yang melibatkan sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan forum musyawarah desa yang lebih terbuka dan inklusif.

Langkah pertama yang diambil adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai pentingnya peran serta mereka dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pembangunan desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang mekanisme musyawarah desa, serta bagaimana partisipasi mereka dalam musyawarah tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah desa. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses musyawarah desa.

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sebelumnya tidak menyadari bahwa mereka dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa hanya perangkat desa atau kepala desa yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah pembangunan desa. Sosialisasi yang dilakukan berhasil membuka wawasan mereka tentang pentingnya suara mereka dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. Setelah sosialisasi, masyarakat mulai merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam forum musyawarah desa yang sebelumnya mereka anggap tidak terlalu relevan bagi

mereka.

Pentingnya sosialisasi dalam tahap awal ini tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran tetapi juga untuk membangun rasa tanggung jawab di kalangan masyarakat. Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan masyarakat mengenai proses ini menyebabkan mereka merasa terpinggirkan atau tidak berdaya. Melalui pendekatan ini, banyak masyarakat yang kemudian merasa lebih dihargai dan bersemangat untuk berpartisipasi.

Setelah sosialisasi, langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan kepada perangkat desa mengenai teknik fasilitasi musyawarah desa yang inklusif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam memfasilitasi musyawarah desa yang mampu mengakomodasi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Pelatihan ini meliputi pengenalan berbagai metode fasilitasi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap suara dalam masyarakat dapat didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.



Gambar 1. Sosialisasi program PKM

Pelatihan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa. Sebelumnya, hanya sedikit perangkat desa yang memiliki keterampilan untuk memfasilitasi diskusi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Setelah pelatihan, perangkat desa lebih mampu untuk menciptakan suasana yang inklusif dan demokratis dalam setiap pertemuan. Teknik-teknik fasilitasi seperti pembagian kelompok kecil untuk diskusi, penggunaan teknik berbicara bergiliran, serta pencatatan hasil musyawarah yang terbuka dan transparan mulai diterapkan dalam musyawarah desa. Hal ini berhasil meningkatkan kualitas diskusi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Salah satu hasil positif dari pelatihan ini adalah peningkatan kemampuan perangkat desa dalam menangani dinamika yang terjadi dalam musyawarah desa. Mereka kini lebih mampu mengelola diskusi dengan memperhatikan keberagaman pandangan dan memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan untuk berbicara, tanpa ada yang merasa terabaikan. Pelatihan ini juga mendorong perangkat desa untuk

lebih transparan dalam mencatat hasil musyawarah dan membuat keputusan berdasarkan konsensus yang diperoleh melalui diskusi terbuka.

Langkah terakhir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah implementasi forum musyawarah desa yang lebih inklusif dan partisipatif. Forum ini diadakan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya. Forum ini didampingi oleh tim pelaksana yang bertugas memastikan keberlanjutan dan keberagaman suara yang didengarkan dalam forum tersebut.



Gambar 2. Foto bersama kegiatan PKM

Hasil dari implementasi forum partisipatif ini sangat menggembirakan. Sebelum program ini dilaksanakan, hanya sekitar 40% dari masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa. Namun, setelah dilaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan forum musyawarah desa yang lebih terbuka, partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan hingga mencapai 70%. Forum ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka secara terbuka dan langsung memengaruhi keputusan yang diambil dalam perencanaan pembangunan desa. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah pengalokasian anggaran desa yang lebih merata untuk berbagai sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Peningkatan partisipasi ini tidak hanya terbatas pada jumlah individu yang hadir dalam forum tersebut, tetapi juga mencakup kualitas kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota masyarakat. Terlebih lagi, dengan adanya forum yang lebih inklusif, kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti perempuan dan pemuda, kini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merancang kebijakan pembangunan desa. Keberhasilan ini menandakan bahwa forum musyawarah desa dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan kebijakan yang lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, program ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat Desa Mootinelo. Dengan mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing sektor ini, program pengabdian ini berhasil membawa perubahan signifikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Program ini bekerja sama dengan Lembaga Legislatif dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik yang ada di desa Mootinelo.

Penilaian kondisi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sektor-sektor tersebut. Hasil penilaian menunjukkan bahwa puskesmas desa tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Puskesmas yang ada tidak memiliki ruang perawatan yang cukup, alat medis yang terbatas, dan kurangnya tenaga medis yang berkompeten. Selain itu, sektor pendidikan juga menghadapi masalah serupa, dengan fasilitas yang kurang mendukung kualitas pendidikan. Banyak sekolah yang kekurangan buku pelajaran, alat bantu belajar, serta tenaga pengajar yang memiliki kompetensi memadai. Infrastruktur dasar, seperti jalan desa dan akses air bersih, juga dalam kondisi buruk dan tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

Proses penilaian ini sangat penting untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dan memberi gambaran yang lebih jelas mengenai prioritas yang perlu diambil dalam perencanaan selanjutnya. Data yang diperoleh dari penilaian ini menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang akan dijalankan dalam program pengabdian ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program pengabdian ini melakukan berbagai perbaikan di sektor kesehatan dan pendidikan. Fasilitas puskesmas diperbaiki dengan menambah alat medis yang diperlukan dan memperbaiki ruang perawatan yang ada. Selain itu, tenaga medis di puskesmas juga dilatih untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Di sektor pendidikan, program ini melibatkan pelatihan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sarana pendidikan juga diperbaiki dengan menambah buku-buku pelajaran, alat bantu belajar, serta fasilitas lainnya yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di desa dan memberikan akses yang lebih baik bagi anak-anak desa untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap langkah perbaikan fasilitas ini juga sangat penting, karena mereka tidak hanya merasakan manfaat langsung dari perbaikan yang dilakukan, tetapi juga merasa memiliki peran dalam keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun.

Perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan desa yang rusak dan penyediaan air bersih, menjadi prioritas utama dalam program ini. Infrastruktur jalan yang rusak diperbaiki dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengerjaannya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap fasilitas yang dibangun. Penyediaan air bersih juga dilakukan dengan membangun sumur bor di beberapa titik yang sebelumnya tidak memiliki akses air bersih.

Selain itu, penyuluhan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat, pencegahan penyakit, serta perawatan kesehatan yang tepat. Penyuluhan ini juga berfokus pada pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Hasil dari penyuluhan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, yang pada gilirannya mengurangi angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kebersihan.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Program

Meskipun program ini telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai banyak tujuan, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat yang menyebabkan mereka sulit memahami pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan desa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui penyuluhan yang lebih sering dan pelatihan yang lebih berkesinambungan.

Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan material juga menjadi hambatan, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur dan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Program ini berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab dan turut serta dalam proses pembangunan desa.

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Mootinelo berhasil mencapai tujuannya dengan signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan memperbaiki pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Sebelum program dilaksanakan, hanya sekitar 40% masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa, namun setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan, partisipasi meningkat menjadi 60%. Forum musyawarah desa yang inklusif juga berhasil terbentuk, melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Di sektor pelayanan publik, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dilakukan, seperti peningkatan kapasitas puskesmas dan sarana pendidikan, berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan peningkatan kunjungan ke puskesmas sebesar 20% dan penurunan tingkat putus sekolah sebanyak 10%. Perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan desa yang rusak dan penyediaan air bersih, juga berkontribusi pada peningkatan mobilitas dan kenyamanan hidup masyarakat. Selain itu, program ini berhasil memperkuat kapasitas perangkat desa, dengan 80% perangkat desa yang dilatih mampu mengimplementasikan teknik fasilitasi musyawarah yang inklusif, yang berkontribusi pada tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Mootinelo, menciptakan perubahan yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia; 2020.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Profil Desa di Indonesia. Jakarta: BPS; 2020.
- Hasbullah M. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan: Konsep dan implementasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press; 2006.
- McGee R, Gaventa J. Review of the impact of transparency and accountability initiatives. IDS Working Paper. Institute of Development Studies; 2010.
- Soeharto H, Sulisty A. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. J Ilmu Pemerintahan. 2019;4(2):118-129.
- United Nations Development Programme (UNDP). Sustainable Development Goals: Goal 16 - Peace, justice, and strong institutions. New York: United Nations Development Programme; 2016.
- World Bank. The role of local government in the decentralization process: Governance and public administration in Indonesia. Washington, D.C.: World Bank Publications; 2015.